



**Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah Subhanallahu Wa ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD selama lima tahun kedepan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyediakan rencana teknis lima tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance and Clean Government*) menuju Kepulauan Riau Makmur Berdaya Saing dan Berbudaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

Tanjungpinang, Juni 2023
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



MARTIN L. MAROMON, S.Sos M.Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19670306 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan Renja Sekretariat DPRD.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Renja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD.....	10
2.2. Analisin Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III Tujuan dan Sasaran.....	41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2. Arah Kebijakan Tahun 2024 Berdasarkan isu strategis dan Dokumen RPJMD Tahun 2021- 2026.....	41
3.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	46
BAB V PENUTUP.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancangan perencanaan juga dilakukan

untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap PD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD. Renstra-PD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-PD tersebut, maka PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-PD) untuk periode 1(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada

Renstra-PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja Sekretariat DPRD) dalam penyusunannya sudah mempedomi peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di provinsi kepulauan riau, ada 4 (empat) sub kegiatan dan 2 program terkait pengarusutamaan gender di Renja Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja Sekretariat DPRD) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2024 yang memuat rencana arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di dasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan ke sekretariatan DPRD dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ke sekretariatan DPRD. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara

efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem rancangan perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Sekretariat DPRD guna mencapai sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembar Negara RI Tahun 2017 nomor 136);
 14. Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau;

15. Keputusan Presiden Nomor 60/P tahun 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
23. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, tambahan lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepri tahun 2021-2026;
31. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
32. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor .. Tahun 2023 tentang tentang RKPD 2024
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
34. Surat Edaran Gubernur Nomor B/188.5/3/BPPP/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan;
2. Sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sebagai Sebagai dasar / acuan kelurahan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan;
4. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan Karangsari Tahun Anggaran 2024;
5. Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan tahun 2024 dan ;
6. Memberikan gambaran tentang prioritas program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan penyusunan renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau :

- Sebagai media yang dapat dijadikan sumber dasar penyusunan rencana kerja;
- Agar tersedia kelengkapan dokumen perencanaan yang akan menjadi arah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2022

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN;

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah, Arah Kebijakan Tahun 2024 Berdasarkan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024, Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu tahun 2021-2026.

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, Jumlah Program/Kegiatan di Renja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Kepri program 2 (dua), kegiatan : 14 (empat belas) dan sub kegiatan : 54 (lima puluh empat). Jumlah program/Kegiatan DPPA Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Kepri: program : 2 (dua), kegiatan : 14 (empat belas) dan sub kegiatan : 46 (tiga puluh enam). dapat diartikan keselarasan antara program pada Renja dan DPA, disini sekretariat dewan masih konsistensi pada dokumen perencanaan yang telah tersedia.

Rata-rata capaian kinerja indikator kegiatan perangkat daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kepri di Triwulan I : 29,26 %, Triwulan II : 19,26 %, Triwulan III : 9,26 % dan Triwulan IV : 39,26 %. Rata-rata capaian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri sampai dengan Triwulan I : 19,26 %, Triwulan II : 19,26 %, Triwulan III : 9,26, Triwulan IV : 39,26. Sekretariat DPRD Provinsi Kepri di triwulan IV ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang capaian kinerjanya rendah atau tidak mencapai target diantaranya : Bimbingan Tekhnis DPRD, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kendala atau permasalahan terhadap capaian kegiatan yang tidak mencapai target :

- 1) Bimbingan teknis impleplemtasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada bulan februarai tahun 2022 yang mengikuti partisipan lebih kurang 100 orang, rencana awal dalam melaksanakan kegiatan ini dalam satu tahun dilaksanakan tiga kali, pada saat penyusunan anggaran perubahan ada pergeseran anggaran sehingga bimtek implementasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan, pada dasarnya target capaian output sub kegiatan tercapai dari target yang ditetapkan adalah 60 orang.

- 2) Bimbingan Teknis DPRD secara capaian fisik tercapai dari 45 Orang anggota DPRD yang mendapat pembekalan teknis tugas dan fungsi. Tingginya aktivitas anggota DPRD baik di komisi, fraksi sehingga terjadinya benturan jadwal dalam melaksanakan bomtek, sehingga bimtek ini dikesampingkan maka terjadinya tidak optimal dan tidak efisien dalam penggunaan anggaran.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renja sampai dengan triwulan IV Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 mengelola anggaran belanja langsung pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.155,746,039,370.00 sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 terserap sebesar Rp.151,119,631,810,25 (97,03%) Anggaran tersebut digunakan untuk 2 Program dengan realisasi anggaran dan realisasi kinerja masing-masing program dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup Provinsi
Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Periode Pelaksanaan: 2022

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan dan Sub	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan		Satuan
						Target Renja OPD tahun 2022	Realisasi Renja OPD tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(4+5+7+9)	11=(10/4)	
I	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100%	100%	100%	100%	1	100%			
1	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1	1Dokumen			
1	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1	1Dokumen	1	1	
2	4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1	1Dokumen	1	1	

3	4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1	1Dokumen	1	1	
4	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
5	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
2	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	100 %	100%	100 %	100%	1	100%			
	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan 14	Orang/Bulan 14	Orang/Bulan 14	14	1	Orang/Bulan 14	1	1	
	4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	

	4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
3	4. 02. 01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	100%	100%	100%	100%	1	100%			
	4. 02. 01. 1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1		1	1	
	4. 02. 01. 1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	1	60 Orang			
	4. 02. 01. 1.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang					1	1	

	4. 02. 01. 1.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	1	600orang	1	1	
4	4. 02. 01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1	12 Bulan			
	4. 02. 01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	1 Paket	1	1	
	4. 02. 01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	1Paket	1	1	
	4. 02. 01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
	4. 02. 01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1	1	

	4. 02. 01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit					
	4. 02. 01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					1	1	
	4. 02. 01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit 15	Unit 15	Unit 15	Unit 15	1		1	1	
	4. 02. 01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit 1	Unit 1	Unit 1	Unit 1	1		1	1	
	4. 02. 01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit 1	Unit 1	Unit 1	Unit 1	1		1	1	
	4. 02. 01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit 6	Unit 6	Unit 6	Unit 6	1	6 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1	12Bulan			

	4. 02. 01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
	4. 02. 01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
	4. 02. 01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %		100%			
	4. 02. 01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	60 Unit							
	4. 02. 01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	1	60 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	5 Unit							

	4. 02. 01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1	5 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	1	500 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit							
	4. 02. 01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit							
	4. 02. 01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1	8 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100%			

	4. 02. 01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan 13	Orang/Bulan 13	Orang/Bulan 13	Orang/Bulan 13	1	Orang/Bulan 13	1	1	
	4. 02. 01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	1 Paket	1	1	
	4. 02. 01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	1	45 Orang	1	1	
	4. 02. 01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPR	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1	12 Bulan			
	4. 02. 01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
	4. 02. 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	80 Skor	80 Skor	72 Skor	80 Skor	1.11	74 Skor			
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 %			

	4. 02. 02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1	3 Dokumen			
	4. 02. 02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1	7 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1	3 Dokumen			

	4. 02. 02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1	2 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	1				
	4. 02. 02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang	36 Orang					1	1	
	4. 02. 02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	36 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang	1	36 Orang	1	1	
	4. 02. 02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	7 Dapil	7 Dapil	7 Dapil	7 Dapil	1	7 Dapil			

4. 02. 02.1.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	
4. 02. 02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1
4. 02. 02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1
4. 02. 02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal	100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 %		
4. 02. 02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	1	1
4. 02. 02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	100 %	1	1
4. 02. 02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	1	1

	4. 02. 02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	

2.2 Analisin Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skors	70	72	74	76	78	80	70	72	74	76
2	Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	%	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	n/a	100	100	100	100	100	n/a	100	100	100
4	Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase layanan administrasi keuangan DPRD	%	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100
7	Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase kecukupan sarana prasarana	%	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100
10	Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase kecukupan penunjang fasilitas	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase	%	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
	pemeliharaan n milik daerah											
15	Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Rata-rata capaian kinerja indikator kegiatan perangkat daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kepri di Triwulan I : 29,26 %, Triwulan II : 19,26 %, Triwulan III : 9,26 % dan Triwulan IV : 39,26 %.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra dan penelaahan terhadap tugas, fungsi dan kewenangan maka dapat disampaikan bahwa permasalahan di Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi	Permasalahan yang Dihadapi
Umum dan Kehumasan	1. Lemahnya manajemen panganan administrasi surat menyurat 2. Keberadaan Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum memadai 3. Pelayanan yang belum optimal dan tepat sasaran 4. Minimnya sarana baca dan referensi 5. Pola penanganan keprotokolan yang belum profesional dan tepat 6. Tidak terkelolanya data base dokumentasi
Persidangan, Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan	1. Sarana dan prasarana persidangan yang belum optimal 2. SDM yang kurang memadai dan responsif dalam pelayanan persidangan dan produk hukum.
Kuangan, Perencanaan dan Anggaran	1. Sistem pertanggung jawaban yang belum tertata dengan baik 2. Terbatasnya kemampuan teknis aparat dalam mengelola dan menganalisis data

Struktur organisasi	Permasalahan yang Dihadapi
	3. Penguasaan teknologi informasi Pegawai masih rendah dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas 4. Kemampuan dan kesiapan dalam verifikasi data yang perlu dipertajam dan lebih teliti

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2024, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 tabel 2.1

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	1 Dokumen	90,633,523,800	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	1 Dokumen	90,633,523,800	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	900,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	900,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	200,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	200,000,000	

			Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100,000,000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200,000,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	100%	54,185,030,697	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	100%	54,185,030,697	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/Bulan	52,735,030,697	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/Bulan	52,735,030,697	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	1 Dokumen	850,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	1 Dokumen	850,000,000	

			Tugas ASN					Tugas ASN			
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	200,000,000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	200,000,000	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	200,000,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	12 Bulan	1,100,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	12 Bulan	1,100,000,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500,000,000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	60 Orang	300,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	60 Orang	300,000,000	

		N RIAU)	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				N RIAU)	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kepulaua n Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	150,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kepulaua n Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	150,000,000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kepulaua n Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	150,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kepulaua n Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	150,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	17,453,887,315	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	17,453,887,315	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kepulaua n Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kepulaua n Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000,000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Kepulaua n Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,153,887,315	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Kepulaua n Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,153,887,315	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Kepulaua n Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7,000,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Kepulaua n Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7,000,000,000	

4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300,000,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset yang diadakan	10 Unit	3,000,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset yang diadakan	10 Unit	3,000,000,000	
1	Pengadaan Mebel	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	400,000,000	Pengadaan Mebel	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	400,000,000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	70,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	70,000,000	
3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	680,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	680,000,000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,000,000,000	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6 Unit	850,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6 Unit	850,000,000	

			Disediakan					Disediakan			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	12 Bulan	7,891,005,788	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	12 Bulan	7,891,005,788	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,891,005,788	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,891,005,788	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana kondisi baik	100%	4,100,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana kondisi baik	100%	4,100,000,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	80,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	80,000,000.00	

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	20.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit 5	80,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit 5	80,000,000.00	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit 8	1.000.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit 8	1.000.000.000,00	
7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Aset dalam Pemeliharaan	500 Unit	2,020,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Aset dalam Pemeliharaan	500 Unit	2,020,000,000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4 Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4 Unit	300.000.000,00	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4 Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	4 Unit	300.000.000,00	

7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	8 Unit	300.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	8 Unit	300.000.000,00	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya	100%	1,300,000,000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya	100%	1,300,000,000	
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	13*45 Orang/Bulan	200,000,000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	13*45 Orang/Bulan	200,000,000	
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	650,000,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	650,000,000	
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	450,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	450,000,000	
9	Layanan Administrasi DPRD		Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	12 Bulan	703,600,000.00	Layanan Administrasi DPRD		Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	12 Bulan	703,600,000.00	
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	1 Laporan	703,600,000.00	Fasilitasi Fraksi DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	1 Laporan	703,600,000.00	

		N RIAU)	Fraksi DPRD				N RIAU)	Fraksi DPRD			
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skors 74	68,974,967,719	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skors 74	68,974,967,719	
			Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %				Persentase Terlaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %		
10	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	3 Dokumen	1,000,000,000	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	3 Dokumen	1,000,000,000	
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	300,000,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	300,000,000	
2	Pembahasan Rancangan Perda	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	300,000,000	Pembahasan Rancangan Perda	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	300,000,000	
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-	1 Dokumen	200,000,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-	1 Dokumen	200,000,000	

		N RIAU)	Undangan				N RIAU)	Undangan			
4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	200,000,000	
11	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)	2 Dokumen	500,000,000	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)	2 Dokumen	500,000,000	
1	Pembahasan APBD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Terlaksananya Pembahasan APBD	2 Dokumen	500,000,000	Pembahasan APBD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Terlaksananya Pembahasan APBD	2 Dokumen	500,000,000	
12	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	100%	5,400,000,000	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	100%	5,400,000,000	
1	Pendalaman Tugas DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1,000,000,000	Pendalaman Tugas DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1,000,000,000	
2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah,	1 Dokumen	350,000,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah,	1 Dokumen	350,000,000	

			Publikasi dan Dokumentasi Dewan					Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang	750,000,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang	750,000,000	
4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	36 Orang	1,800,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	36 Orang	1,800,000,000	
5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1,500,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1,500,000,000	
13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	7 Dapil	30,676,774,757	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	7 Dapil	30,676,774,757	
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1Laporan	1,476,774,757	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1Laporan	1,476,774,757	
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	200,000,000	
3	Pelaksanaan Reses	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	29,000,000,000	Pelaksanaan Reses	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	29,000,000,000	

14	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan di kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terfasilitasi	100%	31,398,192,962	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan di kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terfasilitasi	100%	31,398,192,962	
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	30,748,192,962	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	30,748,192,962	
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	200,000,000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	200,000,000	
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	250,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	250,000,000	
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	200,000,000	
					159,608,491,519					159,608,491,519	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri pada tahun 2024, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan (musrenbag prov) yang berdoman pada Isu Strategis dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4.02.01.1.07 .Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	(Provinsi Kepulauan Riau, TANJUNGPINANG)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,00 / Unit	Perlunya pengadaan mobil inova untuk menunjang kinerja (1 unit)
2	4.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.02.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Provinsi Kepulauan Riau, TANJUNGPINANG)	umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00 / Paket	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan

					masyarakat
3	4.02.02.1.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD 4.02.02.1.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Provinsi Kepulauan Riau, TANJUNGPINANG)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	2 Orang	Tenaga Ahli
4	4.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau, TANJUNGPINANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	PTT Sekwan
5	4.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.02.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau, TANJUNGPINANG)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,00 / Unit	BANTUAN PENGEMBANGAN SARAN PARASARANA PT BATAMONE CYBER MEDIA
6	4.02.02.1.08 - Fasilitasi Tugas DPRD 4.02.02.1.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Provinsi Kepulauan Riau, TANJUNGPINANG)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Pembiayaan

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi sekretariat DPRD ada.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum PD dan juga berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang seperti Perangkat Daerah lainnya berada di bawah Kementrian Dalam Negeri, akan tetapi Sekretariat DPRD mempunyai tugas yang berbeda yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah secara operasional juga memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintahan Provinsi maupun Pusat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas maka produk hukum atau peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan diatasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan, yang implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

3.2 Arah Kebijakan Tahun ke 3 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2021-2026

Berdasarkan isu strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Pembangunan daerah pada Tahun 2024 diarahkan pada **“Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.”**

3.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 3

Pada tahun ketiga diharapkan roda perekonomian sudah pulih dan mengalami peningkatan yang pesat, sehingga perlu terus ditingkatkan dengan tambahan investasi serta penguatan daya saing Daerah. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun ketiga ini ialah mendorong pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi

keunggulan daerah, peningkatan investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, penyederhanaan layanan perizinan investasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor, perlindungan Ketenagakerjaan, jaminan pengembangan karir bagi apra ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya hutan lestari, pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan, pengembangan kawasan strategis industri dan pariwisata berbasis kemaritiman, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), pengembangan industri galangan kapal, pengembangan pariwisata maritime, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan tatalaksana konsesi tata ruang laut untuk perkapalan, Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga, Peningkatan tatalaksana konsesi migas bawah laut, Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan sektor kelautan, Pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan, pemanfaatan jasa lingkungan dan perhutanan sosial, peningkatan sanitasi lingkungan, mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk,

menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang peka terhadap pengembangan potensi regional, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan masing-masing wilayah.

3.4 Tujuan dan sasaran Renja Sekretaria DPRD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan terkait dengan Tujuan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, maka Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

Tujuan	SASARAN	Indikator tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan		Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	(Hasil Survey Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD : Sumber Data Laporan Akhir Kegiatan)	Skor	68	70	72	74	76	78	80	80
	1.Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	Layanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD sesuai SOP : Total Layanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah X 100	%	94	96	100	100	100	100	100	100
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Rapat yang terlaksana : Jumlah rapat yang terjadwan X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	fasilitasi penyusunan laporan reses DPRD : Jumlah laporan reses per anggota DPRD X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	jumlah pembahasan anggaran yang dilaksanakan : jadwal pembahasan anggaran	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

Tujuan	SASARAN	Indikator tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			menjadi perda									
	2.Meningkat nya layanan administrasi dan keuangan DPRD	Persentase layanan administrasi keuangan DPRD	layanan Administrasi Keuangan DPRD Sesuai SOP : Total Layanan Administrasi Keuangan DPRD X 100	%	94	96	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	Usur kegiatan pengumpul data kinerja : Total unsur kegiatan pengumpulan data kinerja X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD yang disusun : jumlah laporan X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
	3.Terpenuhi nya kebutuhan sarana prasarana sekretariat DPRD	Persentase kecukupan sarana prasarana	Barang Inventaris yang Kondisi Baik : Total Barang Inventaris X 100	%	94	96	100	100	100	100	100	100
		Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD	Jumlah tenaga ahli fraksi : total tenaga ahli fraksi yang direncanakan X 100. (tenaga ahli fraksi 1 (satu) orang untuk setiap fraksi X 8	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

Tujuan	SASARAN	Indikator tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			fraksi=8 orang									
		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	Jumlah layanan kepegawaian : Jumlah seluruh urusan	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase kecukupan penunjang fasilitas	Jumlah terlaksananya sub kegiatan : jumlah sub kegiatan yang direncanakan X100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan : total rekening yang terencanakan X 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemeliharaan milik daerah	Jumlah barang yang terpelihara : jumlah barang milik daerah X 100	%	n/a	96	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD	Jumlah fraksi DPRD mendapat layanan administrasi : Jumlah fraksi DPRD X100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Setiap program memiliki indikator kinerja outcome, sedangkan kegiatan memiliki indikator kinerja output. Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu tahun 2021-2026.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan :

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Kegiatan :

9. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

1. Fasilitas Fraksi DPRD

II. PROGRAM DUKUNGANPELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Kegiatan :

10. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Pembahasan Rancangan Perda
3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

11. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

1. Pembahasan APBD

Kegiatan :

12. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

1. Pendalaman Tugas DPRD
2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Kegiatan :

13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3. Pelaksanaan Reses

Kegiatan :

14. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel . 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Kepri

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	4. 02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor			100 %	92.133.523.800				97,326,506,902
1	4. 02. 01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun			1Dokumen	900,000,000			1Dokumen	900,000,000
1	4. 02. 01. 1.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1Dokumen	200,000,000
2	4. 02. 01. 1.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
3	4. 02. 01. 1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
4	4. 02. 01. 1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	100,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		RIAU)						
5	4. 02. 01. 1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	200,000,000	APBD		1 Laporan	200,000,000
2	4. 02. 01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya			100%	54,185,030,697			100%	57,966,132,398
6	4. 02. 01. 1.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	199 Orang/Bulan	52,735,030,697	APBD		122 Orang/Bulan	56,516,132,398
7	4. 02. 01. 1.02. 01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	850,000,000	APBD		1 Dokumen	850,000,000
8	4. 02. 01. 1.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	4. 02. 01. 1.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
10	4. 02. 01. 1.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
3	4. 02. 01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi			12 Bulan	1,100,000,000			12 Bulan	1,350,000,000
11	4. 02. 01. 1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Paket	500,000,000	APBD		1 Paket	600,000,000
12	4. 02. 01. 1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	60 Orang	300,000,000	APBD		60 Orang	350,000,000
13	4. 02. 01. 1.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Orang	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	60 Orang	150,000,000	APBD		60 Orang	200,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Undangan								
14	4. 02. 01. 1.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	60 Orang	150,000,000	APBD		60 Orang	200,000,000
4	4. 02. 01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			12 Bulan	17.553.887.315			12 Bulan	20,006,774,504
15	4. 02. 01. 1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Paket	1,100,000,000	APBD		1 Paket	1,250,000,000
16	4. 02. 01. 1.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Paket	9,153,887,315	APBD		1 Paket	10,396,000,000
17	4. 02. 01. 1.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Kunjungan Tamu	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	7,000,000,000	APBD		1 Laporan	8,060,774,504
18	4. 02. 01. 1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	300,000,000	APBD		1 Laporan	300,000,000
5	4. 02. 01. 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah aset yang diadakan			10 Unit	4,100,000,000			10 Unit	3,000,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemerintah Daerah									
19	4. 02. 01. 1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Paket	400,000,000.00	APBD		1 Paket	400,000,000.00
20	4. 02. 01. 1.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	15 Unit	70,000,000.00	APBD		15 Unit	70,000,000.00
21	4. 02. 01. 1.07. 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Unit	1.780.000.000	APBD		1 Unit	680,000,000.00
22	4. 02. 01. 1.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Unit	1,000,000,000.00	APBD		1 Unit	1,000,000,000.00
23	4. 02. 01. 1.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	6 Unit	850,000,000.00	APBD		6 Unit	850,000,000.00
6	4. 02. 01. 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan			12 Bulan	8.191.005.788			12 Bulan	8,000,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	4. 02. 01. 1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	2,000,000,000	APBD		1 Laporan	2,000,000,000
25	4. 02. 01. 1.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	6.191.005.788	APBD		1 Laporan	6,000,000,000
7	4. 02. 01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kondisi baik			100%	4,100,000,000			100%	4,100,000,000
26	4. 02. 01. 1.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	60 Unit	80,000,000.00			60 Unit	80,000,000.00
27	4. 02. 01. 1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	60 Unit	20.000.000,00	APBD		60 Unit	20,000,000.00
28	4. 02. 01. 1.09. 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Unit 5	80,000,000.00	APBD		Unit 5	80,000,000.00

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
29	4. 02. 01. 1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Unit 8	1.000.000.000,00	APBD		Unit 8	1,000,000,000.00
30	4. 02. 01. 1.09. 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset dalam Pemeliharaan	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	500 Unit	2,020,000,000	APBD		500 Unit	2,020,000,000.00
31	4. 02. 01. 1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	4 Unit	300,000,000.00	APBD		4 Unit	300,000,000.00
32	4. 02. 01. 1.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	4 Unit	300,000,000.00	APBD		4 Unit	300,000,000.00
33	4. 02. 01. 1.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	8 Unit	300,000,000.00	APBD		8 Unit	300,000,000.00
8	4. 02. 01. 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya			100%	1,300,000,000.00			100%	1,300,000,000.00

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
34	4. 02. 01. 1.15. 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	45 Orang/ Bulan	200,000,000.00	APBD		45 Orang/ Bulan	200,000,000.00
35	4. 02. 01. 1.15. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Paket	650,000,000.00	APBD		1 Paket	650,000,000.00
36	4. 02. 01. 1.15. 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	45 orang	450,000,000.00	APBD		45 orang	450,000,000.00
9	4. 02. 01. 1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD			12 Bulan	703,600,000.00			12 Bulan	703,600,000.00
37	4. 02. 01. 1.16. 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	703,600,000	APBD		1 Laporan	703,600,000.00
	4. 02. 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD			Skors 74	69.194.967.719				69,434,074,648
			Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			100 %					
10	4. 02. 02.	Pembentukan Perda dan	Jumlah ranperda dalam propemperda			Dokumen	1,000,000,000			Dokumen	1,000,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.01	Peraturan DPRD	yang difasilitasi								
38	4. 02. 02. 1.01. 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	300,000,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
39	4. 02. 02. 1.01. 01	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	300,000,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
40	4. 02. 02. 1.01. 01	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
41	4. 02. 02. 1.01. 01	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
11	4. 02. 02. 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)			2 Dokumen	500,000,000			2 Dokumen	500,000,000
42	4. 02. 02. 1.02. 01	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	2 Dokumen	500,000,000			2 Dokumen	500,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	4. 02. 02. 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan			100%	5,550,000,000			100%	5,859,106,929
43	4. 02. 02. 1.04. 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Luar (Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	1,000,000,000	APBD		1 Dokumen	1,500,000,000
44	4. 02. 02. 1.04. 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	350,000,000	APBD		1 Dokumen	302,090,032
45	4. 02. 02. 1.04. 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	36 Orang	750,000,000	APBD		36 Orang	750,000,000
46	4. 02. 02. 1.04. 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	36 Orang	1,950,000,000	APBD		36 Orang	1,807,016,897
47	4. 02. 02. 1.04. 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	1,500,000,000	APBD		1 Dokumen	1,500,000,000
13	4. 02. 02.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Terlaksananya penyerapan aspirasi			7 Dapil	30,676,774,757			7 Dapil	30,676,774,757

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.05	Masyarakat	Masyarakat di seluruh Dapil								
48	4. 02. 02. 1.05. 01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1Laporan	1,476,774,757	APBD		1Laporan	1,476,774,757
49	4. 02. 02. 1.05. 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
50	4. 02. 02. 1.05. 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	29,000,000,000	APBD		1 Dokumen	29,000,000,000
14	4. 02. 02. 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan di kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terfasilitasi			100%	31.468.192.962			100%	31.468.192.962
51	4. 02. 02. 1.08. 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	30.818.192.962	APBD		1 Dokumen	30.818.192.962
52	4. 02. 02. 1.08. 03	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang	Laporan	(Luar Wilayah, KEPULAUAN	1 Laporan	200,000,000	APBD		1 Laporan	200,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Disusun		RIAU						
53	4. 02. 02. 1.08. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	1 Dokumen	250,000,000	APBD		1 Dokumen	250,000,000
54	4. 02. 02. 1.08. 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
							161.328.491.519				166,760,581,550

BAB V

PENUTUP

RENJA – Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah disajikan ini merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Instansi Pemerintah. Diharapkan Renja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau harus selalu tampil dengan pelayanan prima sebagai fasilitator DPRD pada setiap kegiatan

Tanjungpinang, Juni 2023
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



MARTIN L. MAROMON, S.Sos M.Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19670306 199703 1 004